



BUKU II

**NOTA KEUANGAN
BESERTA
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA
TAHUN 2016**

REPUBLIK INDONESIA



BAGIAN I

**RINGKASAN APBN
TAHUN 2016**



RINGKASAN APBN TAHUN 2016

1. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan dengan 70 persen wilayah berupa laut dan memiliki sekitar 17.504 pulau yang tersebar, Indonesia memiliki tantangan besar dalam melakukan pembangunan yang berkualitas di segala dimensi. Kondisi geografis dan demografis tersebut merupakan tantangan dan peluang bagi Pemerintah untuk memenuhi amanat Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyentuh hajat hidup masyarakat Indonesia, diantaranya untuk mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, pelaksanaan pembangunan harus difokuskan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang menjamin pemerataan dan keadilan untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan antarpenduduk, ketimpangan kewilayahan antara Jawa dan luar Jawa, kawasan barat dan timur, serta antara kota-kota dan kota-desa. Untuk mendukung hal tersebut, kebijakan ekonomi diarahkan kepada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), yang dituangkan dalam rencana pembangunan tahunan melalui rencana kerja pemerintah (RKP).

Dalam periode tahun 2010–2014, yang merupakan tahapan RPJMN kedua, pembangunan ekonomi difokuskan untuk memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Dalam kurun waktu tersebut, indikator-indikator capaian pembangunan menunjukkan tren yang berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan hingga 5,8 persen dan 5,1 persen di tahun 2013 dan 2014, meskipun dalam kurun waktu tahun 2010–2014 tersebut secara rata-rata mampu tumbuh 6,0 persen. Perlambatan tersebut terutama karena kinerja investasi yang tumbuh sebesar 8,5 persen pada tahun 2010 turun menjadi hanya sebesar 4,1 persen pada tahun 2014. Hal ini karena permintaan ekspor yang menurun serta moderasi konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekspor menurun dari sebesar 15,3 persen pada tahun 2010 menjadi sebesar 1,0 persen pada tahun 2014. Penurunan ekspor tersebut terutama disebabkan oleh turunnya permintaan dari *emerging markets* dan harga komoditas global, serta adanya kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah. Sementara itu, inflasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari 7,0 persen di tahun 2010 menjadi 8,4 persen di tahun 2014, setelah sempat turun menjadi 4,3 persen di tahun 2012. Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus terdepresiasi, dari Rp9.087 per dolar Amerika Serikat di tahun 2010 melemah menjadi Rp11.878 per dolar Amerika Serikat di tahun 2014. Kondisi ekonomi tersebut diantisipasi pemerintah dengan melakukan ekspansi pada sisi belanja yang terlihat dari kenaikan persentase defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dari 0,7 persen di tahun 2010, menjadi 2,3 persen di tahun 2014. Tolok ukur efektivitas kebijakan fiskal tersebut tercermin antara lain dari penurunan tingkat pengangguran dari 7,4 persen di tahun 2010 menjadi 5,9 persen di tahun 2014, serta tingkat kemiskinan yang dapat ditekan dari 13,3 persen di tahun 2010 menjadi 11,3 persen di tahun 2014.

Selanjutnya, dalam tahun 2015 yang merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN ketiga (2015–2019), Pemerintah mengajukan APBN Perubahan tahun 2015 untuk mendukung

pelaksanaan sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Nawa Cita dan Trisakti. Seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian di tahun 2015, asumsi dasar ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran dalam APBNP tahun 2015 sebagai berikut. Untuk asumsi dasar ekonomi makro APBNP tahun 2015, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,7 persen (yoy), inflasi diperkirakan 5,0 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat rata-rata diperkirakan Rp12.500 per dolar Amerika Serikat (AS), rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan 6,2 persen, rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 60 dolar Amerika Serikat per barel, serta rata-rata *lifting* minyak mentah dan gas masing-masing ditargetkan 825 ribu barel per hari dan 1.221 ribu barel setara minyak per hari. Sementara itu, dalam APBNP tahun 2015, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.761.642,8 miliar dan belanja negara diproyeksikan mencapai Rp1.984.149,7 miliar. Dengan kondisi tersebut, defisit tahun anggaran 2015 diperkirakan mencapai 1,9 persen dari PDB atau sebesar Rp222.506,9 miliar. Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan anggaran yang direncanakan sebesar Rp242.515,0 miliar dari pembiayaan dalam negeri dan sebesar negatif Rp20.008,1 miliar dari pembiayaan luar negeri (neto).

Tahun 2016 merupakan tahun pertama bagi Pemerintahan Kabinet Kerja bersama dengan DPR RI baru merumuskan dan menyusun APBN secara utuh, sehingga anggaran tahun 2016 diupayakan untuk menampung secara utuh kebijakan dan program dari Pemerintahan Kabinet Kerja. Selain itu, APBN tahun 2016 diharapkan dapat meningkatkan kerja sama yang lebih baik bagi Pemerintah Pusat dan daerah dalam berbagai program pembangunan nasional. Tahun 2016 juga merupakan tahun kedua dari RPJMN 2015—2019, yang dalam periode ini pembangunan difokuskan pada “*mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan iptek yang terus meningkat*”. Berdasarkan fokus tersebut, Pemerintah mengupayakan pembangunan yang menyentuh segala aspek berbangsa dan bernegara dengan menjabarkannya dalam program prioritas Kabinet Kerja yang digariskan dalam RPJMN 2015—2019 yang terdiri dari empat bagian utama, yaitu: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program *quick wins*. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan tersebut memuat sektor-sektor prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015—2019, yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP tahun 2016.

Perkembangan ekonomi global tetap akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2016. Meskipun di tahun 2016 perekonomian dunia dan negara berkembang diperkirakan meningkat, namun peningkatan ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain: (1) kondisi perekonomian global yang masih dibayangi kondisi moderasi pertumbuhan negara mitra dagang utama Indonesia; (2) ketidakpastian prospek kebijakan moneter di Amerika Serikat; dan (3) ketidakpastian pergerakan harga komoditas dunia. Setelah Yunani dinyatakan gagal bayar atas utang IMF senilai 1,5 miliar euro pada 1 Juli 2015 dan menggelar referendum pada 5 Juli 2015, yang intinya 61 persen rakyatnya menolak syarat utang baru yang ditetapkan Troika (Uni Eropa, IMF, dan Bank Sentral Eropa), banyak pihak berpikir bahwa Yunani akan dikeluarkan dari *Eurozone* dan berujung pada krisis besar serta berkepanjangan di Yunani. Namun, berdasarkan *weekly economic and financial report* 29 Juni—5 Juli 2015, kondisi Yunani diyakini tidak berdampak secara langsung dan tidak signifikan bagi Indonesia. Hal ini karena Yunani bukan investor utama di Indonesia dan bukan merupakan mitra dagang utama. Meskipun demikian, Pemerintah tetap perlu memerhatikan perkembangan yang ada

dan mengantisipasi dampak tidak terduga dari sentimen pasar atas krisis ini. Dari sisi domestik, tantangan yang dihadapi dalam mendorong akselerasi pertumbuhan tinggi dan berkeadilan adalah: (1) terbatasnya kapasitas produksi nasional terkait relatif rendahnya produktivitas; (2) relatif rendahnya daya saing dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN; serta (3) mendesaknya kebutuhan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri.

Dengan memerhatikan capaian-capaian RPJMN kedua 2010—2014, keberlanjutan RKP tahun 2015, tantangan ekonomi global dan domestik yang mungkin dihadapi, dan sebagai penjabaran tahun kedua dari RPJMN 2015—2019 dalam menjaga kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis, tema RKP tahun 2016 adalah “*Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas*”. Selanjutnya, tema RKP 2016 dan pencapaiannya akan diterjemahkan dalam kebijakan fiskal dan postur APBN tahun 2016. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, proses serta mekanisme penyiapan, penyusunan, dan pembahasan APBN tahun 2016 mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di samping itu, penyusunan RAPBN tahun 2016 mengacu pada RKP tahun 2016 dan kesepakatan dalam pembicaraan pendahuluan APBN tahun 2016 antara Pemerintah dengan DPR RI, untuk kemudian dibahas bersama Pemerintah dan DPR RI untuk ditetapkan menjadi APBN tahun 2016.

Di tengah tantangan perekonomian global dan nasional, serta target-target program prioritas Kabinet Kerja, APBN tahun 2016 menghadapi tantangan sebagai berikut: (1) upaya mengarahkan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran; (2) *fiscal space* yang tersedia masih perlu ditingkatkan untuk menopang belanja produktif prioritas; (3) belanja yang bersifat mengikat perlu dikendalikan; (4) perlu pengendalian keseimbangan primer; dan (5) pola dan penyerapan anggaran yang produktif perlu ditingkatkan.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, maka APBN sebagai instrumen fiskal harus direncanakan agar senantiasa efisien dalam pengelolaan sumber daya, produktif dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan (pertumbuhan dan kesejahteraan) dengan tetap mengendalikan risiko, dan menjaga keberkelanjutan fiskal dalam jangka menengah. Strategi untuk mencapai hal tersebut ditempuh melalui pendisiplinan pengelolaan fiskal dengan membuat target fiskal, baik pada sisi pendapatan (*tax ratio*), belanja (belanja produktif), maupun pembiayaan (*primary balance*, defisit, dan rasio utang). Upaya tersebut dimaksudkan agar pengelolaan fiskal lebih konsisten dalam pencapaian target jangka menengah, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan postur APBN.

Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan kualitas anggaran dari sisi teknis perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tahun 2016 melalui cara-cara sebagai berikut: (1) memperjelas hubungan yang logis antara alokasi anggaran (*input*) dengan *output* dan *outcome* program dalam kerangka penerapan anggaran berbasis kinerja; (2) mengendalikan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dan kurang produktif, antara lain, belanja perjalanan dinas dan konsinyering; (3) meningkatkan peranan aparaturnya pengawas intern pemerintah (APIP) kementerian negara dan lembaga (K/L) dalam melakukan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), guna menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel;

(4) penerapan sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) agar pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan dengan lebih baik; dan (5) penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja.

Pada akhirnya, cita-cita luhur untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara hanya dapat dicapai melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kesenjangan dan potensi konflik di akar rumput dieliminasi melalui upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, sejalan dengan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, serta produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional adalah kunci sukses untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Namun, segala upaya maksimal tersebut harus disempurnakan dengan melakukan revolusi karakter bangsa serta memperteguh ke-Bhinneka-an dan restorasi sosial Indonesia. Dengan demikian, program Pemerintah melalui Kabinet Kerja dapat terwujud selaras dengan Nawa Cita.

2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2016

Berdasarkan *World Economic Outlook* Oktober 2015 yang dikeluarkan IMF, perekonomian global tahun 2015 diperkirakan tumbuh 3,1 persen, lebih rendah dari tahun 2014 yaitu 3,4 persen. Pertumbuhan tersebut lebih ditopang oleh perbaikan kinerja perekonomian negara maju, sedangkan perekonomian negara berkembang masih mengalami perlambatan. Perbaikan kinerja negara maju tersebut, antara lain, ditopang oleh kebijakan dalam memicu konsumsi dan investasi di Amerika Serikat, perbaikan ekonomi di Eropa yang ditandai dengan perbaikan di sisi permintaan domestik dan inflasi yang mulai terjadi, serta perbaikan dalam investasi yang menopang pertumbuhan di Jepang. Sementara itu, perekonomian negara berkembang diperkirakan melambat dari 4,6 persen di tahun 2014 menjadi 4,0 persen di tahun 2015. Perlambatan ekonomi ini sebagai dampak dari lebih rendahnya harga komoditas dan kondisi keuangan eksternal yang mengalami pengetatan. Di tahun 2016, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan menguat menjadi 3,6 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang diharapkan meningkat menjadi 4,5 persen. Peningkatan ini bergantung dari perbaikan kondisi ekonomi di sejumlah negara yang tengah mengalami krisis, termasuk Rusia, beberapa negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Kinerja perekonomian dunia tersebut diperkirakan masih akan memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang di tahun 2016, termasuk Indonesia.

Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN tahun 2016, terdiri atas tujuh indikator utama, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen; (2) inflasi sebesar 4,7 persen; (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.900 per dolar Amerika Serikat; (4) suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5 persen; (5) harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia's Crude Price/ICP*) sebesar 50 per dolar Amerika Serikat; (6) *lifting* minyak Indonesia sebesar 830 ribu barel per hari; dan (7) *lifting* gas sebesar 1.155 ribu barel setara minyak per hari. Penyusunan asumsi dasar ekonomi makro tersebut mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN 2015–2019, sasaran-sasaran tahunan dalam RKP tahun 2016, dan perkembangan ekonomi domestik maupun global.

3. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2016

APBN tahun 2016 disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal dengan tema “Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Sejalan dengan hal tersebut maka strategi yang ditempuh adalah: (1) memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing, (2) meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya program-program prioritas di tengah tantangan perekonomian global, serta (3) mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Melalui strategi tersebut diharapkan pengelolaan fiskal akan lebih produktif, berdaya tahan, risiko terkendali dan berkelanjutan.

Untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan penguatan daya saing guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, strategi yang dipilih adalah memperkuat stimulus fiskal, yang akan ditempuh baik melalui sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Dari sisi pendapatan negara, pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis ditujukan untuk mendukung iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Sementara itu, dari sisi belanja negara, langkah yang ditempuh dalam meningkatkan ruang fiskal adalah: (1) optimalisasi pendapatan; (2) melanjutkan efisiensi subsidi; (3) efisiensi belanja; dan (4) pengendalian *earmarking* dan belanja wajib. Selain itu, langkah yang juga ditempuh dari sisi belanja negara adalah meningkatkan belanja produktif yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur termasuk kedaulatan pangan dan energi guna meningkatkan daya saing dan peningkatan kapasitas perekonomian. Di sisi pembiayaan, kebijakan pembiayaan yang ditempuh antara lain untuk (1) mengarahkan agar pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; (2) memberdayakan peran swasta, BUMN dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur; dan (3) melakukan inovasi pada instrumen pembiayaan (*creative financing*).

Berkenaan dengan optimalisasi pendapatan negara, kebijakan pendapatan negara terus diarahkan untuk mendorong optimalisasi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas produksi dan penguatan daya saing. Secara umum, kebijakan perpajakan yang akan dilakukan Pemerintah pada tahun 2016 berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) adalah: (1) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha; (2) kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat; (3) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional melalui pemberian fasilitas perpajakan dan penyempurnaan kebijakan hilirisasi sektor industri tertentu; (4) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai melalui penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dan tarif cukai etil alkohol-minuman mengandung etil alkohol (EA-MMEA); dan (5) melaksanakan berbagai kebijakan teknis di bidang pajak. Selanjutnya, Pemerintah juga akan terus berupaya untuk mengoptimalkan PNBP di tahun 2016 melalui kebijakan, antara lain: (1) mengoptimalkan penerimaan sumber daya alam (SDA) minyak dan gas bumi (migas), antara lain melalui peningkatan perkiraan *lifting* dan pencapaian targetnya; (2) penyesuaian tarif produksi/royalti, renegotiasi kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), serta meningkatkan monitoring, evaluasi, dan koordinasi sektor SDA nonmigas; (3) intensifikasi dan ekstensifikasi eksplorasi panas bumi

diiringi dengan penyempurnaan perundang-undangan di bidang panas bumi; (4) penyesuaian tarif pengenaan PNBPN dan peningkatan kualitas pengelola PNBPN perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan; (5) meningkatkan peran BUMN sebagai agen pembangunan untuk mendukung program prioritas pemerintah; dan (6) terus melakukan perbaikan pelayanan badan layanan umum (BLU) kepada masyarakat.

Pokok-pokok kebijakan belanja negara tahun 2016 pada dasarnya diarahkan agar APBN lebih efisien, produktif, dan berkualitas. Kebijakan tersebut ditempuh melalui sepuluh kebijakan utama, yang terdiri atas: (1) mendukung pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan, seperti infrastruktur konektivitas, kedaulatan pangan dan energi, serta kemaritiman; (2) meningkatkan efisiensi belanja negara, antara lain penerapan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran dan pengendalian belanja operasional yang tidak prioritas; (3) mendukung pematapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik, efisiensi birokrasi dengan mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur, dan antisipasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (4) mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan nasional melalui kepastian dan penegakan hukum, menjaga stabilitas politik dan demokrasi; (5) mendukung pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah, antara lain melalui dukungan pembangunan di daerah perbatasan, perdesaan, pinggiran, pusat pertumbuhan di luar Jawa dan kawasan timur dan pengembangan bantuan tunai bersyarat; (6) menguatkan efektivitas pelayanan dan keberlanjutan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mencakup Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta perbaikan kebijakan dan regulasi; (7) memenuhi amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengalokasikan 5 persen dari APBN untuk mendukung pembangunan dan pelayanan di bidang kesehatan; (8) mendukung penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui peningkatan alokasi transfer ke daerah (peningkatan DAK fisik secara signifikan) dan dana desa yang lebih besar daripada peningkatan alokasi belanja K/L serta pemenuhan secara bertahap alokasi dana desa sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (9) penyediaan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan (10) antisipasi ketidakpastian perekonomian, antara lain dengan menyediakan cadangan risiko fiskal.

Kebijakan pengalokasian transfer ke daerah dan dana desa tahun 2016 akan difokuskan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, seiring dengan penerapan kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) di daerah. Tujuan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2016 adalah mewujudkan kesinambungan pembangunan di daerah, meningkatkan kualitas pelaksanaan program prioritas nasional maupun daerah, mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi (*local taxing power*), serta mengurangi kesenjangan antardaerah khususnya melalui upaya pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Di samping itu, alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2016 akan dilakukan dengan tetap memerhatikan aspek perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antardaerah yang diupayakan proporsional, adil, dan akuntabel dalam perhitungan dan distribusinya. Selain itu, tahun 2016 merupakan tahun kedua dialokasikannya dana desa dalam APBN. Sejalan dengan konsep Nawa Cita dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa akan difokuskan untuk mengurangi kesenjangan antara desa-kota dan mendorong kemandirian desa.

Selanjutnya, arah kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah di tahun 2016 adalah: (1) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah untuk meningkatkan

nilai tambah BUMN sebagai agen pembangunan antara lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, dan kemaritiman; (2) mengendalikan rasio utang pemerintah terhadap PDB dalam batas yang aman; (3) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas antara lain melalui obligasi ritel; (4) mengoptimalkan dana kelolaan BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan, termasuk memperluas akses sektor usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM), perumahan murah, dan pendidikan; (5) memprioritaskan skema kerja sama pemerintah swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur; (6) memberikan penjaminan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur; serta (7) mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi MBR.

4. Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016

Sebagai penjabaran tahun kedua dari RPJMN 2015–2019, RKP tahun 2016 merupakan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Tujuan akhir dari upaya pembangunan tersebut adalah meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program K/L, lintas kementerian negara, kewilayahan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RKP tahun 2016 memiliki arti yang penting dalam keberlanjutan pembangunan dan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKP tahun 2016 selain memerhatikan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal dan pencapaian terkini program-program pembangunan, juga mengacu pada fokus RPJMN ketiga yang digariskan dalam RPJPN tahun 2005-2025, yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut, tema RKP tahun 2016 ditetapkan: “*Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas*”.

Selain itu, sejak periode pemerintahan Kabinet Kerja, Pemerintah merumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Kesembilan agenda tersebut kemudian dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015–2019 yang terdiri dari empat bagian utama, yaitu: (1) Norma Pembangunan; (2) Tiga Dimensi Pembangunan; (3) Kondisi Perlu; dan (4) Program-program *Quick Wins*. Tiga Dimensi Pembangunan dan Kondisi Perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam RKP tahun 2016 sebagai penjabaran pelaksanaan RPJMN tahap ketiga, dengan penjelasan sebagai berikut.

Dimensi Pembangunan Manusia. Dimensi ini merupakan penjabaran Nawa Cita, yang meliputi meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, beretika, berbudaya, dan berdaya saing, sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas.

Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Nawa Cita dalam menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Prioritas pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan. Meskipun seluruh penduduk telah memperoleh manfaat dari pertumbuhan pendapatan nasional, yang dicerminkan oleh meningkatnya konsumsi per kapita penduduk, namun konsumsi per kapita penduduk 40 persen terbawah tumbuh sangat rendah, sementara penduduk 20 persen terkaya mencatat pertumbuhan konsumsi yang meningkat pesat. Oleh karena itu, melalui dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan, peningkatan kualitas hidup diupayakan melalui prioritas pada pemerataan antarkelompok pendapatan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Program-program dalam dimensi ini merupakan penjabaran Nawa Cita dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Kondisi Perlu. Program-program pembangunan untuk menciptakan Kondisi Perlu merupakan penjabaran Nawa Cita menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis, dan terpercaya, serta memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kondisi Perlu meliputi program peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Sebagai penjabaran tema RKP 2016 di atas, maka disusunlah strategi pembangunan yang memuat sektor-sektor prioritas atas dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor-sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan, serta kondisi perlu tersebut. Sasaran pembangunan untuk masing-masing sektor prioritas dalam RKP tahun 2016, dapat diintisarkan sebagai berikut.

Sasaran dimensi pembangunan manusia dan masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter. Sasaran pada bidang pendidikan meliputi: (1) rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun adalah 8,5 tahun; (2) rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun adalah 95,1 persen; (3) prodi perguruan tinggi minimal terakreditasi B adalah 58,8 persen; (4) persentase SD/MI berakreditasi minimal B adalah 76,5 persen; (5) persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B adalah 71,8 persen; (6) persentase SMA/MA berakreditasi minimal B adalah 79,1 persen; (7) persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B adalah 56,6 persen; (8) Rasio APK SMP/MTs antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya adalah 0,87; (9) Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya adalah 0,58; (10) angka partisipasi PAUD adalah 70,85 persen; (11) angka partisipasi murni SD/MI adalah 91,79 persen; (12) angka partisipasi kasar SD/MI/ sederajat adalah 111,14 persen; (13) angka partisipasi murni SMP/MTs/ sederajat adalah 80,87 persen; (14) angka partisipasi kasar SMP/MTs/ sederajat adalah 104,47 persen; (15) angka partisipasi murni SMA/MA/SMK adalah 60,84 persen; dan (16) angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK/ Sederajat adalah 85,51 persen.

Selanjutnya, sasaran pembangunan pada bidang kesehatan dan gizi masyarakat antara lain: (1) persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 77 persen; (2) jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria sebanyak 245 kabupaten/kota; (3) jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi sebanyak 700 kecamatan; (4) jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat sebanyak 92,4 juta jiwa; (5) jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 2.000 Puskesmas; (6) persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 92,5 persen; dan (7) persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 88,6 persen. Bidang perumahan memiliki sasaran antara lain rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak 76,1 persen, akses sanitasi layak 66,3 persen, pengurangan 30 persen kawasan permukiman kumuh perkotaan dari 38.431 hektar, dan angka kekurangan tempat tinggal sebesar 6,5 juta. Sementara itu, sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan lintas bidang revolusi mental adalah untuk Kedaulatan Politik, yaitu mantapnya proses konsolidasi demokrasi, efektifnya penegakan hukum, dan meningkatnya budaya hukum dalam bentuk kepatuhan kepada hukum dan aturan; untuk Kemandirian Ekonomi, yaitu menguatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, Pemerintah, dan masyarakat; dan untuk Kepribadian dalam Kebudayaan, yaitu meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya Nusantara berdasarkan Pancasila, serta menguatnya karakter dan jati diri bangsa.

Sasaran pada dimensi pembangunan sektor-sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, serta pariwisata dan industri. Sasaran sektor kedaulatan pangan berupa peningkatan produksi dalam negeri dengan didukung pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi irigasi. Adapun produksi dalam negeri terutama berfokus pada produksi padi (76,2 juta ton), jagung (21,4 juta ton), kedelai (1,8 juta ton), gula (3,3 juta ton), daging sapi dan kerbau (0,59 juta ton), dan produksi ikan (14,8 juta ton). Sasaran kedaulatan energi dan ketenagalistrikan ditujukan untuk memenuhi rasio elektrifikasi 90,15 persen dan konsumsi listrik per kapita sebesar 985 kWh. Sasaran ini dicapai melalui peningkatan produksi sumber daya energi minyak dan gas bumi, serta batubara; peningkatan penggunaan dalam negeri gas bumi dan batu bara; pembangunan sarana dan prasarana energi antara lain meliputi *floating storage regasification unit (FSRU)/regasification unit/LNG terminal* (2 unit); akumulasi panjang jaringan pipa gas (10.296 km); pembangunan SPBG (30 unit); serta jaringan gas kota (121 ribu sambungan rumah) dan pembangunan kilang minyak bumi. Sasaran sektor kemaritiman ditujukan untuk memperkuat jati diri sebagai negara maritim, pemberantasan tindakan perikanan liar, membangun konektivitas nasional, dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Pada tahun 2016, target sektor kelautan adalah peningkatan ketaatan pelaku usaha perikanan mencapai 73 persen dan peningkatan luas kawasan konservasi laut menjadi 17,1 juta hektar. Sasaran sektor pariwisata adalah wisatawan manca negara (12 juta orang), wisatawan Nusantara (260 juta kunjungan), dan devisa sebesar Rp172,0 triliun. Selain itu, sasaran pembangunan inklusif pariwisata adalah meningkatnya partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata dan meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi. Sementara itu, sasaran sektor industri meliputi pertumbuhan sektor industri (6,9 persen) dan kontribusi terhadap PDB (21,3 persen). Sektor pariwisata juga memiliki sasaran untuk membangun 100 *techno park* di kabupaten/kota dan *science park* di tingkat provinsi sampai dengan tahun 2019.

Sasaran pembangunan dimensi pemerataan dan kewilayahan terdiri atas pembangunan antarkelompok pendapatan dan pembangunan antarwilayah. Pembangunan antarkelompok pendapatan ditujukan untuk mencapai sasaran perlindungan sosial bagi penduduk kurang

mampu, antara lain dengan kepesertaan jaminan kesehatan (89,3 persen) dan akses terhadap layanan keuangan (11,88 persen), pengembangan penghidupan berkelanjutan, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, peningkatan daya saing tenaga kerja, kepesertaan program SJSN ketenagakerjaan 40 juta pekerja formal dan 3,2 juta pekerja informal, peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja, dan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi. Selanjutnya, sasaran pembangunan antarwilayah adalah pemerataan pembangunan melalui peran wilayah dalam pembentukan PDB nasional, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan/wilayah pinggiran, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, dan pembangunan kawasan perkotaan. Peran wilayah dalam pembentukan PDB nasional meliputi Sumatera (24,4 persen), Jawa (56,5 persen), Bali-Nusa Tenggara (2,5 persen), Kalimantan (9,3 persen), Sulawesi (4,9 persen), dan Maluku-Papua (2,4 persen). Pembangunan desa dan kawasan perdesaan melalui penurunan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Sementara itu, pencapaian sasaran yang lain, yaitu: pengembangan kawasan perbatasan, antara lain melalui pengembangan pusat ekonomi perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN); pembangunan daerah tertinggal antara lain melalui pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tertinggal (68,49); pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, antara lain melalui kawasan ekonomi khusus (KEK) di luar Jawa (7 kawasan); dan pembangunan kawasan perkotaan, antara lain melalui menguatnya peran, fungsi, dan manajemen pembangunan kawasan perkotaan metropolitan yang sudah ada.

Sasaran pembangunan yang merupakan Kondisi Perlu meliputi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Sasaran di bidang kepastian dan penegakan hukum diukur, antara lain melalui indikator indeks perilaku anti korupsi (3,8) di tahun 2016. Di bidang keamanan dan ketertiban, sasaran pembangunan yang ingin dicapai, antara lain meliputi penanganan penyalahgunaan narkoba, penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan, dan pengembangan pertahanan negara. Sasaran di bidang politik dan demokrasi meliputi persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia (100 persen), peningkatan daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikal terorisme (30 persen), persentase perundingan yang berhasil diselenggarakan dalam rangka penyelesaian penetapan batas wilayah di laut serta penegasan batas wilayah di darat (75 persen), dan indeks penyelesaian kasus warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum Indonesia (BHI) di luar negeri (40,1). Untuk tata kelola dan reformasi birokrasi, sasaran yang hendak dicapai, antara lain meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, opini WTP atas laporan keuangan, dan instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B).

5. Ringkasan Postur APBN Tahun 2016

Postur APBN tahun 2016 disusun dengan menggunakan kaidah ekonomi publik yang terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pada tahun 2016, besaran pendapatan negara ditetapkan mencapai Rp1.822.545,8 miliar, naik 3,5 persen dari targetnya pada APBNP tahun 2015. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan ditetapkan mencapai Rp1.546.664,6 miliar atau naik 3,9 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Sementara itu, PNBPN ditetapkan mencapai Rp273.849,4 miliar, naik 1,8 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015. Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam APBN tahun 2016 dengan jumlah penerimaan yang mencapai 84,9 persen dari total pendapatan negara.

Di lain pihak, besaran anggaran belanja negara untuk tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp2.095.724,7 miliar, naik 5,6 persen dari pagunya pada APBNP tahun 2015. Belanja negara di tahun 2016 tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.325.551,4 miliar, yang terdiri atas anggaran untuk belanja K/L sebesar Rp784.125,7 miliar dan belanja non K/L sebesar Rp541.425,7 miliar, ditambah dengan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770.173,3 miliar. Alokasi anggaran untuk transfer ke daerah dan dana desa yang mendekati alokasi anggaran belanja K/L adalah bentuk komitmen pemerintah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Penyumbang persentase kenaikan terbesar dalam transfer ke daerah dan dana desa adalah alokasi anggaran untuk dana transfer khusus dan dana desa, antara lain dengan dialokasikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur publik daerah, realokasi dana dekonsentrasi/tugas pembantuan ke DAK, dan pemenuhan *roadmap* dana desa yang dalam tahun 2016 dialokasikan paling sedikit 6 persen.

Dalam struktur APBN yang berlaku saat ini, belanja pemerintah pusat menurut klasifikasi fungsi dikelompokkan menjadi 11 fungsi. Dalam APBN tahun 2016, belanja pemerintah pusat terbesar menurut fungsi adalah fungsi ekonomi, yaitu sebesar 27,2 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, dan sisanya sebesar 72,8 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Relatif tingginya porsi alokasi anggaran pada fungsi ekonomi dikarenakan perubahan dan penyesuaian pada ruang lingkup dan terminologi pada klasifikasi fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.2/2015, tentang Klasifikasi Anggaran. Sebagai konsekuensi atas penyesuaian tersebut terdapat beberapa kebijakan dalam fungsi yang lain, seperti program subsidi energi dan non energi diklasifikasikan ke dalam fungsi ekonomi.

Dengan besaran pendapatan dan belanja negara tersebut, APBN tahun 2016 mengalami defisit anggaran sebesar Rp273.178,9 miliar atau 2,15 persen terhadap PDB, yang berarti naik dari defisit pada APBNP tahun 2015 sebesar 1,90 persen. Defisit APBN tahun 2016 tersebut direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp272.780,7 miliar dan pembiayaan yang bersumber dari luar negeri (neto) sebesar Rp398,2 miliar. Ringkasan postur APBN tahun 2015-2016 disajikan pada **Tabel I.1** berikut.

TABEL I.1
POSTUR APBN, 2015 - 2016
(miliar rupiah)

URAIAN	2015	2016
	APBNP	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.761.642,8	1.822.545,8
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.758.330,9	1.820.514,1
1. Penerimaan Perpajakan	1.489.255,5	1.546.664,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	269.075,4	273.849,4
II. PENDAPATAN HIBAH	3.311,9	2.031,8
B. BELANJA NEGARA	1.984.149,7	2.095.724,7
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.319.549,0	1.325.551,4
1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga	795.480,4	784.125,7
2. Belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga	524.068,6	541.425,7
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	664.600,7	770.173,3
1. Transfer ke Daerah	643.834,5	723.191,2
2. Dana Desa	20.766,2	46.982,1
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(66.776,0)	(88.238,2)
D. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(222.506,9)	(273.178,9)
% Defisit terhadap PDB	(1,90)	(2,15)
E. PEMBIAYAAN (I+II)	222.506,9	273.178,9
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	242.515,0	272.780,7
1. Perbankan Dalam Negeri	4.785,4	5.498,3
2. Non Perbankan Dalam Negeri	237.729,6	267.282,3
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(20.008,1)	398,2
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	48.647,0	75.091,9
2. Penerusan Pinjaman (SLA)	(4.471,9)	(5.909,7)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	(64.183,2)	(68.784,0)

Sumber: Kementerian Keuangan

6. Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap Postur APBN Tahun 2016

Besaran asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai basis perhitungan dalam menyusun postur APBN tahun 2016. Oleh karena itu, perubahan variabel asumsi dasar ekonomi makro dari yang semula ditetapkan, akan memengaruhi besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran dalam postur APBN. Dampak dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2016 terhadap postur APBN dapat ditransmisikan dalam bentuk analisis sensitivitas.

Variabel-variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak positif terhadap postur APBN tahun 2016 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ICP, serta kenaikan *lifting* minyak dan gas bumi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak langsung pada kenaikan pendapatan perpajakan dan berdampak tidak langsung terhadap kenaikan anggaran transfer ke daerah terutama dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus. Kenaikan anggaran transfer ke daerah tersebut menyebabkan peningkatan belanja negara yang harus diikuti dengan peningkatan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi terhadap kenaikan penerimaan perpajakan masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan belanja negara, sehingga secara total peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak positif terhadap postur APBN, yaitu berupa pengurangan defisit anggaran. Seiring dengan hal tersebut, peningkatan tingkat inflasi juga berpengaruh positif terhadap postur APBN, karena dampak kenaikan pada pendapatan negara lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan belanja negara.

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki dampak pada semua sisi APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran terutama pada anggaran yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai komponen perhitungan. Namun, dampak depresiasi nilai tukar rupiah terhadap kenaikan pendapatan negara masih lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan belanja negara, sehingga secara total berdampak positif terhadap postur APBN yaitu mengurangi defisit anggaran.

Perubahan ICP memengaruhi besaran APBN terutama pada anggaran yang menggunakan harga minyak mentah sebagai komponen perhitungan. Kenaikan ICP berdampak positif terhadap penerimaan migas, namun kenaikan ini masih jauh lebih besar daripada kenaikan DBH migas, sehingga secara total kenaikan ICP akan berdampak pada pengurangan defisit APBN. Selanjutnya, perubahan *lifting* minyak dan gas bumi akan memengaruhi besaran APBN pada anggaran yang bersumber dari penjualan minyak mentah Indonesia, yaitu pendapatan PPh migas, PNBP SDA migas, dan DBH migas.

Sebaliknya, variabel-variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak negatif terhadap postur APBN adalah kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan. Perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama pembayaran bunga utang sehingga menambah defisit APBN.

Angka sensitivitas APBN tahun 2016 terutama digunakan untuk melakukan perhitungan cepat postur APBN. Perhitungan cepat tersebut diharapkan mampu menangkap perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang terjadi dan memberikan gambaran atas arah besaran defisit APBN tahun 2016. Meskipun demikian, postur APBN yang sesungguhnya belum bisa berpatokan

pada hasil perhitungan angka sensitivitas tersebut karena besaran dalam postur APBN selain dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi makro, juga menampung berbagai kebijakan. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBN tahun 2016 dirangkum dalam **Tabel I.2.**

Tabel I.2
SENSITIVITAS APBN 2016 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
(triliun rupiah)

URAIAN	Pertumbuhan Ekonomi ↑ +0,1%	Inflasi ↑ +1%	SPN ↑ +1%	Nilai Tukar Rupiah ↑ +Rp100/USD	ICP ↑ +USD1	Lifting ↑ +10rb
A. Pendapatan Negara	1,1 - 1,5	7,6 - 10,3	-	3,7 - 4,9	3,4 - 3,9	1,6 - 3,0
a. Penerimaan Perpajakan	1,1 - 1,5	7,6 - 10,3	-	2,0 - 2,4	0,8 - 0,8	0,2 - 0,4
b. PNBP	-	-	-	1,7 - 2,5	2,7 - 3,1	1,4 - 2,6
B. Belanja Negara	0,1 - 0,5	2,5 - 3,9	1,4 - 1,7	2,2 - 3,4	2,6 - 3,8	0,5 - 1,0
a. Belanja Pemerintah Pusat	0,0 - 0,1	0,7 - 1,3	1,4 - 1,7	1,4 - 2,2	1,8 - 2,6	0,1 - 0,3
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,1 - 0,4	1,8 - 2,6	-	0,8 - 1,2	0,7 - 1,2	0,4 - 0,8
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	1,0 - 1,0	5,1 - 6,4	(1,7) - (1,4)	1,5 - 1,5	0,1 - 0,9	1,1 - 2,0
D. Pembiayaan	-	-	-	(0,5) - 0,3	-	-
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	1,0 - 1,0	5,1 - 6,4	(1,7) - (1,4)	0,9 - 1,8	0,1 - 0,9	1,1 - 2,0

Sumber: Kementerian Keuangan



BAGIAN II

**APBN TAHUN 2016 DAN
APBN JANGKA MENENGAH
PERIODE 2017-2019**

